
Analisis Keamanan Nasional Atas Kebijakan *War On Drugs* Presiden Duterte Di Filipina

I Gusti Ngurah Aristya Pranawa Putra¹⁾, Putu Titah Kawitri Resen²⁾, Penny Kurnia Putri³⁾

^{1,2,3)}Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Abstrak

Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui alasan Filipina bersikukuh untuk tetap menerapkan kebijakan *War on Drugs*. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan kerangka pemikiran Realisme dan Keamanan Nasional untuk melihat kausalitas sikap Filipina dalam merespon tekanan tersebut. Dalam analisis pembahasan, peneliti menemukan jawaban bahwa meningkatnya tingkat penyalahgunaan narkoba di Filipina telah menjadi ancaman bagi keamanan nasional Filipina. Filipina mengeluarkan kebijakan *War on Drugs* untuk menghilangkan ancaman ini, ditambah lagi penyalahgunaan narkoba memiliki hubungan yang erat dengan beberapa kejahatan yang mengancam keselamatan warga Filipina. Dengan kebijakan tersebut, Filipina merespon tekanan internasional dengan tetap menerapkan kebijakan perang narkoba karena Filipina tetap ingin mempertahankan keamanan warga negara Filipina.

Kata-kunci : Keamanan Nasional, Filipina, Realisme, *War on Drugs*

Abstract

The aim of this research is to see the causality behind the reasons for the Philippines' insistence to continue implementing the War on Drugs policy. This study used qualitative research methods. The researcher uses the Realism and National Security framework to see the causality of the Philippines' attitude in responding to these pressures. In this study, it was found that the answer is that the increasing level of drug abuse in the Philippines has made the issue a threat to the Philippines' national security. The Philippines issued a War on Drugs policy to eliminate this threat, plus drug abuse has a close relationship with several crimes that threaten the safety of Filipinos. With this policy, the Philippines responds to international pressure by continuing to implement a drugs war policy because the Philippines still wants to maintain the security of Filipino citizens.

Keywords: *National Security, Philippines, Realism, War on Drugs*

Kontak Penulis

I Gusti Ngurah Aristya Pranawa Putra
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana
Alamat: Jalan PB Sudirman (Kampus Sudirman) Denpasar, Bali
Telp: +62 361 255378 Fax: +62 361 255916
E-mail : nguraharistya1998@gmail.com

PENDAHULUAN

Pasca terjadinya Perang Dingin, isu keamanan kemaanan dalam Hubungan Internasional semakin berkembang, hingga memasuki ranah isu keamanan non-tradisional, contohnya adalah mengenai perdagangan obat-obatan terlarang atau narkoba. Filipina menjadi salah satu contoh negara yang memiliki isu keamanan non-tradisional ini. Pada tahun 1972, Filipina berada pada tahap awal yang mana terdapat 2.000 pengguna narkoba dan ganja (Dangereous Drugs Board Philippines, 2018). Semakin berkembangnya kasus penyalahgunaan narkoba di Filipina, membuat isu narkoba menjadi isu keamanan yang disorot oleh Filipina.

Duterte, selaku Presiden Filipina mengeluarkan sebuah kebijakan *War on Drugs*, yang mana memberikan wewenang penuh kekepolisian yang bertugas dalam operasi *war on drugs* jika para terduga didapati melawan pada saat penangkapan. Kebijakan tersebut membuat pihak kepolisian yang bertugas saat operasi berlangsung, dijamin untuk tidak didakwa ataupun ditindak. Akibat hal tersebut, Filipina menerima banyak tekanan dari berbagai pihak.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia menjadi salah satu poin utama, yang menjadi polemik selama kebijakan *war on drugs* tersebut dioperasikan. Penyelidikan akan dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional atau ICC ke Filipina, terkait dugaan terjadinya pelanggaran HAM pada kebijakan *war on drugs* tersebut. Tidak hanya ICC, Amnesti Internasional juga ikut mendesak Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut karena dianggap melakukan pembunuhan dalam skala besar (The Guardian, 08/07/2019). Banyaknya tekanan dari dunia internasional tidak membuat Filipina menyerah dalam menetapkan kebijakannya. Duterte mengatakan bahwa kebijakan *War on Drugs*

miliknya akan tetap berlangsung hingga ia selesai menjabat sebagai presiden (Philstar Global, 31/01/2017). Bertolak belakangnya sikap yang diambil oleh Filipina dengan tekanan yang didapatkan, membuat peneliti tertarik untuk melihat kausalitas dari Pemerintah Filipina tetap meneruskan kebijakannya, meski menuai banyak kontroversi dari dunia internasional mengenai pelanggaran hak asasi manusia.

Peneliti mengguna dua tulisan yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka dalam membantu peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Tulisan pertama yaitu milik Danilo Andres Reyes. Tulisan Reyes memiliki judul "*The Spectacle of Violence in Duterte's 'War on Drugs'*". Tulisannya diterbitkan di Journal of Current Southeast Asian Affairs pada tahun 2016. Tulisan milik Reyes (2016) membahas tujuan yang ingin dituju oleh Presiden Duterte dalam operasi kebijakan *war on drugs*nya tersebut. Tulisan milik Reyes (2016) membantu peneliti dalam menggambarkan suatu negara yang lebih memprioritaskan keamanannya secara domestik. Salah satu *highlight* dalam tulisan milik Reyes (2016), ialah pembenaran dalam penghapusan nilai individu seseorang, karena hal tersebut dianggap tidak layak untuk dilindungi.

Tulisan kedua yang digunakan oleh peneliti dalam tinjauan pustaka adalah tulisan milik Steven R. David, dengan judul "*Fatal Choices: Israel's Policy of Targeted Killing*" yang diterbitkan pada tahun 2002. Secara garis besar, tulisan David (2002) menggambarkan mengenai kebijakan Israel pada saat intifada kedua, September 2000 yang mana kebijakan tersebut cukup kontroversi. Banyaknya korban jiwa berjatuh, terutama warga sipil akibat operasi tersebut membuat Israel mendapat kecaman internasional. Meskipun begitu, Israel tetap menerapkan kebijakannya tersebut. Dengan argumen yang dibawa oleh David

(2002) bahwa meskipun Israel mendapati kecaman internasional, terutama terkait pelanggaran HAM akibat banyaknya korban berjatuhannya, Israel tetap menerapkan kebijakannya tersebut demi kepentingan nasionalnya sendiri. Tulisan milik Reyes (2016) dan David (2002), akan membantu peneliti menjelaskan kausalitas dari penetapan kebijakan kontroversi *War on Drugs* tersebut. Peneliti mengambil dua konsep/teori untuk membantu menjelaskan alasan Filipina tetap menerapkan kebijakannya, meskipun mendapati kecaman terkait pelanggaran HAM.

Menurut Jill Steans (2010), beberapa kaum realis beranggapan bahwa terdapat hukum yang tidak berubah yang mengatur perilaku individu dan negara: yaitu negara, seperti halnya manusia, pada dasarnya memiliki kepentingan pribadi dan agresif, sehingga akan mengejar kepentingan mereka dengan merugikan orang lain dan tanpa memperhatikan batasan hukum atau moralitas (Steans, 2010: 53). Pengejaran kekuasaan dan kepentingan nasional, merupakan hal-hal yang dikejar atau diutamakan oleh kaum realis dan hal tersebut dipercayai untuk menggerakkan politik dunia. Menurut Steans (2010), realisme klasik memiliki upaya untuk memahami dunia dari sudut pandang negarawan atau diplomat yang dipaksa beroperasi di dunia yang tidak pasti dan berbahaya (Steans, 2010: 57). Kaum realis percaya bahwa negara yang merupakan aktor utama dalam hubungan internasional, memiliki kewajiban utama sebagai negara yaitu untuk warganya sendiri, bukan untuk komunitas internasional yang abstrak.

Teori realisme menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. Kaum realis berasumsi, bahwa negara merupakan aktor utama dan rasional dalam hubungan internasional. Pengejaran kepentingan nasional menjadi salah satu tujuan utama dari sebuah negara, tanpa melihat batasan hukum dan moralitas. Selain itu, kedaulatan menjadi salah satu hal penting

dalam pandangan kaum realisme, sehingga tidak ada negara ataupun institusi lain yang memiliki hak dalam melakukan intervensi terkait permasalahan domestik negara lain.

Dengan teori ini, peneliti menggunakan realisme untuk melihat sikap yang diambil oleh Filipina, sebagai aktor rasional dan kesatuan, dalam merespon kecaman internasional terkait kebijakan *War on Drugs* miliknya. Posisi Amnesti Internasional dan Dewan HAM sebagai institusi internasional yang ingin melakukan intervensi ke permasalahan domestik Filipina, yang mana kebijakan tersebut dianggap melanggar rezim internasional, yaitu Hak Asasi Manusia. Dengan mengabaikan kecaman tersebut, menunjukkan bahwa Filipina memiliki alasannya tersendiri, sehingga tetap mengoperasikan kebijakan *War on Drugs* ditengah kecaman internasional.

Peneliti menggunakan konsep keamanan nasional yang diutarakan oleh J. Jackson-Preece (2011). Ia mengatakan bahwa istilah dari keamanan nasional merujuk pada semua kebijakan publik yang berfokus kepada keamanan nasional, merupakan kebijakan yang dibuat oleh negara untuk memastikan kelangsungan hidupnya sebagai komunitas yang terpisah dan berdaulat, serta menjaga keselamatan dan kemakmuran warganya (Preece, 2011: 30). Dalam tulisannya juga, berdasarkan pandangan realisme ia mengatakan bahwa:

"Kebijakan keamanan nasional diarahkan untuk menciptakan dan memelihara angkatan bersenjata untuk pertahanan dan pencegahan nasional. Mereka juga melibatkan tindakan yang dirancang untuk menanggapi ancaman internal terhadap keamanan seperti penjahat, pemberontak, teroris, dan lainnya" (Preece, 2011: 19).

Filipina menerapkan *War on Drugs* merupakan salah satu kebijakan negara yang berfokus pada sektor keamanan. Tingginya tingkat pengguna narkoba di Filipina membuat permasalahan tersebut dianggap sebagai

ancaman bagi keamanan nasional Filipina. Melalui kebijakan *War on Drugs* tersebut, Filipina berencana untuk mengamankan negaranya, terutama keamanan dari masyarakatnya dengan menghilangkan ancaman, yang mana merupakan para penyalahguna narkoba. Dengan kerangka pemikiran ini, peneliti akan menggambarkan tentang tujuan utama dari Filipina sehingga mendasari kausalitas dari respon Filipina terhadap ancaman dari aktor lain.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat eksplanatif kausalitas. Sumber data yang peneliti dapatkan, yaitu data sekunder berupa jurnal penelitian, buku, laporan, dan lain-lain. Peneliti menggunakan negara sebagai level analisis. Teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah *document-based research* dan *internet-based research* dengan perolehan dokumen sekunder dan resmi. *Secondary analysis* menjadi teknik analisis dalam penelitian ini. Teknik penyajian data yang peneliti gunakan yaitu narasi, tabel, diagram, ataupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan dan Kebijakan Pengguna Narkoba di Filipina Sebelum Duterte

Filipina memiliki sejarah yang cukup Panjang terkait isu penyalahgunaan narkoba. Setelah Filipina memperoleh kemerdekaan pada 4 Juli 1946, kecanduan narkoba di Filipina mulai dari berbagai cara penggunaannya. Mulai dari merokok opium, penggunaan alkaloid opium, seperti morfin, kokain, dan heroin, hingga penggunaan obat-obatan sintesis seperti demerol dan metadon. Pada tahun 1972, masalah narkoba baru pada tahap awal, dengan hanya 20.000 pengguna narkoba dan ganja sebagai pilihan utama di antara pengguna di Filipina (Dangerous Drugs Board Philippines, 2018).

Penggunaan "*methamphetamine hydrochloride*" atau yang dikenal shabu semakin meningkat. Pada akhir tahun 1990-an, Filipina menjadi produsen dan pengeksportir bersih dari shabu atau dikenal juga sebagai "kokain orang miskin" (The Asean Post, 20/09/20). Pada tahun 2012, DDB bekerja sama dengan *Philippine Normal University* untuk mencari data pengguna narkoba, dan mengeluarkan hasil pengguna yang lebih sedikit, yaitu 1,3 juta pengguna. Berdasarkan data dari PBB, Filipina menjadi negara pengguna shabu terbesar diantara negara di Asia Timur, dan sekitar 2,2 persen penduduk Filipina yang berumur 16 dan 64 tahun merupakan pengguna *methamphetamines* atau shabu pada tahun 2012 (The Asean Post, 20/09/20).

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh PDEA, melalui konsolidasi yang dikumpulkan berdasar dari laporan operasional dan lembaga penegak hukum lainnya, sejumlah 20,51% atau sebanyak 8.629 desa dari total 42.065 *barangay* di Filipina, mendapati kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Pada Februari 2016, PDEA memberikan informasi bahwa sekitar 26,91% atau sekitar 11.321 *barangay* dari total 42.065 *barangay* di Filipina terkena dampak dari narkoba (kebanyakan di daerah perkotaan) (Philippine National Police, 01/07/16). Dilihat dari laporan PDEA tersebut, maka jumlah wilayah yang terdampak akibat penyalahgunaan narkoba meningkat pada tahun 2016, dengan jumlah angka yang tidak sedikit.

Penggunaan narkoba ini tentunya tidak hanya merugikan secara kesehatan, namun juga memengaruhi keamanan publik. Jika dalam sisi keamanan publik, dapat dikatakan bahwa kebanyakan tindak kriminal yang terjadi di Filipina, memiliki kaitan yang kuat terhadap penggunaan narkoba. Pelaku dari beberapa kejahatan seperti pemerkosaan atau pembunuhan merupakan pecandu narkoba,

atau bahwa mereka melakukan perampokan dan perampasan sehingga memiliki uang yang cukup untuk membeli narkoba yaitu shabu (Philippine News Agency, 08/01/20). Perkembangan kasus narkoba, baik pengguna dan perdagangan transnasional di Filipina membuat pemerintah sadar bahwa isu ini merupakan ancaman bagi negara.

Permasalahan narkoba yang terjadi di Filipina, tentunya tidak membuat pemerintah hanya diam. Salah satunya, Filipina membuat sebuah skenario dalam pemberantasan narkoba, yaitu Republic Act 6425, atau yang lebih dikenal sebagai "*Dangerous Drugs Act of 1972*" yang disetujui pada 30 Maret 1972 (Dangereous Drugs Board Philippines, 2018). Akhirnya, Pada tahun 2016, Rodrigo Duterte terpilih sebagai Presiden Filipina. Duterte sendiri membuat isu penyalahgunaan narkoba di negaranya menjadi salah satu fokus utama yang ingin ditumpas olehnya selama menjabat. Saat ia melakukan kampanye dari Januari sampai Mei 2016, Duterte berjanji untuk membunuh pengedar narkoba, pengguna, dan kriminal yang akhirnya memberikannya dukungan populer dari masyarakat Filipina (Reyes, 2016: 112). Kebijakan yang dikeluarkan Duterte ialah *War on Drugs*. Bekerja sama dengan Polisi Nasional Filipina (PNP), kebijakan Duterte dalam Proyek Rencana Kampanye Anti Narkoba: "Double Barrel" dimulai pada 1 Juli 2016, yang mana hari Duterte menjabat (Reyes, 2016: 112).

Kebijakan *War On Drugs* Presiden Duterte

Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Duterte untuk menumpas kejahatan narkoba di Filipina, membuat kepolisian dianggap kerap melakukan *extrajudicial killing* atau pembunuhan yang terjadi di luar proses hukum. Duterte sendiri memberikan dukungan penuh terhadap kepolisian Filipina untuk terus menerapkan kebijakannya, dengan mengatakan bahwa pihak kepolisian dapat membunuh para "idiot" atau yang dianggap sebagai tersangka

penyalahgunaan narkoba (The Atlantic, 19/08/2019). Pihak kepolisian diberikan hak untuk membunuh jika mereka percaya dalam proses penangkapan tersangka penyalahgunaan tersebut, mereka berada dalam bahaya dan Duterte akan mengampuni para polisi yang berakhir di penjara.

Dalam prosesnya, *Human Rights Watch* mengumpulkan informasi yang mereka dapatkan dari warga Filipina terkait penyerang bersenjata operasi *War on Drugs*. Mereka bersaksi kepada HRW bahwa penyerang bersenjata tersebut biasanya terdiri dari beberapa orang yang bekerja secara kelompok. Beberapa informasi yang didapatkan HRW tersebut dapat menggambarkan bagaimana parahnya proses dari *War on Drugs* yang dikeluarkan Filipina semenjak Duterte menjabat sebagai presiden. Selama proses kebijakan ini, tidak sedikit masyarakat Filipina yang menjadi korban jiwa dalam *extrajudicial killing* yang dilakukan oleh pihak berwenang. Filipina mengeluarkan data mengenai jumlah korban berjatuh akibat kebijakannya yang dimasukkan dalam *#RealNumbersPH*. Angka tersebut merupakan "*Real Numbers*" yang dipercayai sebagai angka kematian yang paling benar, menurut informasi terbaru dari PNP Public Information Office. Untuk data *#RealNumbersPH* per tanggal 31 Oktober 2021, jumlah kematian sudah mencapai angka 6.215 (Philippine Drug Enforcement Agency, 2021).

Kontroversi Kebijakan *War On Drugs* di Filipina

Selama proses dari kebijakan *War on Drugs* tersebut, tentunya mendapati banyak komentar dari berbagai kalangan terkait jumlah kematian yang menjadi tanda tanya, terutama mempertanyakan angka yang dikeluarkan oleh pemerintah Filipina yang dianggap tidak benar sepenuhnya. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh *Armed Conflict Location & Event Data Project*, setiap institusi ataupun organisasi yang melakukan penyelidikan

mengenai angka asli dari jumlah korban akibat operasi anti narkoba di Filipina berbeda-beda, bahkan melebihi dari angka #*RealNumbersPH*.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) memperkirakan bahwa korban sebenarnya selama proses kebijakan *War on Drugs* Duterte setidaknya mencapai 8.663 korban jiwa. Selain itu, Berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada ICC terkait penyelidikan yang ingin mereka lakukan, mereka mendapati bahwa jumlah korban sipil jauh lebih tinggi, yaitu antara 12.000 sampai 30.000 korban jiwa. Tidak hanya dari kalangan institusi yang mengomentari terkait angka kematian tersebut.

Jumlah angka kematian akibat proses kebijakan *War on Drugs* tersebut tentunya menjadi sebuah kontroversi. Banyaknya korban yang berjatuh, ditambah dengan perlakuan pemerintah terhadap kepolisian yang tidak melakukan proses hukum ke beberapa kasus pembunuhan selama *War on Drugs* dilakukan, membuat beberapa kalangan mengecam kebijakan tersebut. *War on Drugs* yang dilakukan oleh Filipina diduga terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) selama prosesnya berlangsung.

Amnesti Internasional mengatakan bahwa kepolisian Filipina telah melakukan pembunuhan dan pembayaran terhadap orang lain untuk membunuh para pelanggar narkoba dalam naungan eksekusi di luar proses hukum yang menyebabkan banyaknya kejahatan terhadap HAM. Kepala Kejaksaan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Fatou Bensouda juga memberikan perhatian terhadap Filipina terkait kebijakannya mengenai *War on Drugs* yang diduga melakukan pembunuhan di luar hukum. Kepala Kejaksaan ICC menegaskan kembali bahwa bagi siapapun di Filipina yang menghasut ataupun terlibat dalam tindakan kekerasan masal termasuk dengan memerintahkan, meminta, mendorong atau berkontribusi, dengan cara lain, untuk

melakukan kejahatan dalam yurisdiksi ICC berpotensi untuk melakukan pertanggung jawaban dalam tuntutan di pengadilan (CNN Philippines, 14/10/2016).

Tekanan terhadap pemberhentian kebijakan *War on Drugs* di Filipina tidak hanya sampai di situ. Islandia membuat sebuah rancangan resolusi dan mengajukannya kepada Dewan HAM PBB. Rancangan tersebut berisikan tentang desakan untuk mencegah eksekusi di luar hukum yang terjadi di Filipina dan hal ini menandakan untuk pertama kalinya Dewan HAM PBB diminta untuk menangani sebuah krisis (Reuters, 05/07/19). Rancangan tersebut berfokus terhadap laporan mengenai pembunuhan di luar hukum, penangkapan secara sewenang-wenang, dan penghilangan secara paksa. Resolusi tersebut disepakati pada Forum Geneva yang dilakukan pada tahun 2019. Dewan HAM PBB menyetujui resolusi yang diusulkan oleh Islandia setelah melewati proses voting dengan hasil disetujui oleh 18 negara, 15 negara absen, dan 14 negara menentang resolusi tersebut, termasuk Filipina (Ministry for Foreign Affairs Government of Iceland, 11/07/19). Namun, terlepas dari semua tekanan tersebut, Filipina lebih memilih untuk tetap menerapkan kebijakannya, daripada menghiraukan kecaman-kecaman dari aktor lain untuk memberhentikan kebijakan *War on Drugs* miliknya.

Faktor Keamanan Nasional Filipina Atas Respon Terhadap Kecaman Internasional

Seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, bahwa kebijakan *War on Drugs* milik Filipina mendapati banyak kecaman dari beberapa aktor internasional. Respon yang diberikan oleh Filipina terhadap kecaman tersebut tentunya merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk mengamankan kebijakan *War on Drugs* agar tetap beroperasi. Kaum realisme percaya, bahwa negara merupakan aktor kesatuan dan rasional. Dikatakan sebagai aktor kesatuan, karena meskipun terdapat

perbedaan pandangan di antara para pemimpin politik atau birokrasi dalam negara, pada akhirnya diselesaikan sehingga negara berbicara dengan satu suara (Viotti, 1999: 55). Sedangkan, negara dikatakan sebagai aktor rasional, dengan mengingat bahwa negara mempertimbangkan alternatif yang layak untuk mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki negara (Viotti, 1999: 55). Kepala pemerintahan Filipina yang merupakan pimpinan tertinggi di negara tersebut, mengeluarkan kebijakan *War on Drugs* hanya untuk berfokus kepada permasalahan domestik, yang merupakan tujuan utama Duterte dari sebelum terpilihnya menjadi Presiden Filipina.

Kebijakan *War on Drugs* mendapati kecaman dari internasional karena kebijakan tersebut dianggap melanggar rezim internasional, yaitu HAM. Mengambil dari salah satu asumsi dasar kaum realisme milik Viotti (1999), yaitu keamanan nasional merupakan tujuan utama, merupakan gambaran yang tepat bagi sikap Filipina dalam merespon kecaman internasional. Mengingat bahwa isu penyalahgunaan narkoba di Filipina mulai dimasukkan ke dalam ranah ancaman keamanan nasional, maka kebijakan *War on Drugs* dioperasikan oleh Filipina, guna menangani ancaman tersebut. Dengan hal ini, kebijakan *War on Drugs* Filipina merupakan salah satu cara Filipina dalam mencapai kepentingan nasionalnya, yaitu keamanan nasional.

Meskipun mendapati kecaman mengenai pelanggaran HAM, Steans (2010) memberikan asumsi bahwa, beberapa kaum realis beranggapan bahwa terdapat hukum yang tidak berubah yang mengatur perilaku individu dan negara: yaitu negara, seperti halnya manusia, pada dasarnya memiliki kepentingan pribadi dan agresif, sehingga akan mengejar kepentingan mereka dengan merugikan orang lain dan tanpa

memperhatikan batasan hukum atau moralitas (Steans, 2010: 53). Melalui asumsi tersebut, maka sejalan dengan sikap yang diambil oleh Filipina, yang mana sebagai aktor kesatuan dan rasional menurut kaum realis, ia tidak memerhatikan adanya hukum dan moralitas, salah satunya HAM karena pada dasarnya, Filipina mengejar kepentingan mereka sendiri, yaitu keamanan nasional meskipun kebijakan yang diterapkan merenggut banyak korban jiwa.

Keluarnya Filipina dari Mahkamah Pidana Internasional atau ICC merupakan salah satu tindakan dari Filipina untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Realisme masih mempercayai keberadaan dari organisasi atau institusi internasional, salah satunya adalah ICC. Namun, institusi tersebut dianggap tidak lagi sesuai oleh Filipina akibat kecaman yang diberikan oleh ICC. Kecaman terhadap kebijakan *War on Drugs* milik Filipina merupakan sebuah ancaman bagi kepentingan nasional Filipina, yang merupakan kebijakan itu sendiri. Seperti yang kaum realisme percaya, lembaga-lembaga internasional hanya signifikan sejauh mereka mengizinkan negara-negara untuk mengejar kepentingan mereka sendiri (Steans, 2010: 66). ICC dianggap sudah tidak mengizinkan Filipina untuk mengejar kepentingan nasionalnya, karena kecaman tersebut berisikan pernyataan ICC ingin melakukan investigasi ke Filipina guna menyelidiki kebijakan *War on Drugs* yang sedang berlaku.

Dengan semua respon yang diberikan oleh Filipina terhadap tekanan terkait kebijakan *War on Drugs* miliknya, semua itu tertuju kepada satu alasan, yaitu menjaga kepentingan nasional dari Filipina itu sendiri. Filipina tentunya memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai untuk memenuhi kebutuhan negara dan masyarakatnya, dan hal tersebut terkandung dalam kepentingan nasional.

Dalam hal ini, kepentingan nasional dari Filipina, ialah keamanan nasional.

Seperti yang dikatakan oleh J. Jackson-Preece (2011), keamanan nasional merujuk pada semua kebijakan publik yang berfokus kepada keamanan nasional, merupakan kebijakan yang dibuat oleh negara untuk memastikan kelangsungan hidupnya sebagai komunitas yang terpisah dan berdaulat, serta menjaga keselamatan dan kemakmuran warganya (Preece, 2011: 30). Kebijakan *War on Drugs* tersebut merupakan kebijakan domestik Filipina yang berfokus kepada kebijakan keamanan nasional, yang mana tindakan tersebut dilakukan untuk menangani ancaman internal negara terhadap keamanan. Ancaman yang dimaksud tentunya adalah para pelaku kejahatan narkoba itu sendiri. Filipina melakukan apapun untuk mencapai kepentingan keamanan nasionalnya, meskipun dalam kebijakan *War on Drugs* tersebut melibatkan tindakan kekerasan.

Kepentingan keamanan dari Filipina sudah tercantum dari fokus utama Presiden Duterte semenjak ia terpilih menjadi presiden. Duterte mengatakan bahwa ia akan melawan kriminalitas, obat-obatan terlarang, dan korupsi tanpa henti dan berkelanjutan (Rappler, 26/07/16). Tujuan-tujuan tersebut tentunya merupakan beberapa hal yang dilakukan oleh Filipina untuk menjaga keamanan dan keselamatan warganya, yang mana merupakan tugas Filipina sebagai negara.

Kebanyakan tindak kriminal yang terjadi di Filipina, memiliki kaitan yang kuat terhadap penggunaan narkoba. Pelaku dari beberapa kejahatan seperti pemerkosaan atau pembunuhan merupakan pecandu narkoba, atau bahwa mereka melakukan perampokan dan perampasan sehingga memiliki uang yang cukup untuk membeli narkoba yaitu shabu (Philippine News Agency, 08/01/20). Beberapa kasus penangkapan para pengguna dan pengedar narkoba di Filipina juga pernah

terlibat dalam berbagai kasus kriminal. Tidak hanya itu, penyalahgunaan narkoba di Filipina, hal tersebut juga dapat menghancurkan moral dari masyarakat, serta dapat mengakibatkan meluasnya pengabaian aturan hukum, khususnya dalam kalangan muda masyarakat Filipina (National Security Strategy Philippines, 2018).

Pemerintah Filipina percaya bahwa perang melawan narkoba dan kriminalitas merupakan dua sisi dalam satu koin. Berdasarkan data dari PNP, dari tahun 2016 hingga 2021 selama Duterte menjabat, jumlah kasus kejahatan index mencapai 395.920, dan angka tersebut terpaut jauh jika dibandingkan pada saat Presiden Filipina sebelumnya, Benigno Aquino III's. Pada saat Benigno menjabat, dari Juni 2010 sampai Juni 2016, total kejahatan index di Filipina mencapai 1.113.712. Jika dilihat, maka kejahatan index menurun sebanyak 64% dari masa pemerintahan sebelum Duterte (Inquirer.Net, 26/07/21). Meskipun kebijakan *War on Drugs* milik Filipina merenggut banyak korban jiwa, namun kebijakan tersebut juga mampu menurunkan persentase kejahatan di Filipina selama kebijakan tersebut berlangsung. Hasil dari kebijakan tersebut merupakan kepentingan nasional yang ingin dituju oleh Filipina, yang mana menurunnya indeks kejahatan sehingga keamanan untuk masyarakatnya semakin terjaga.

Salah satu tujuan keamanan nasional dari Filipina adalah untuk memberikan keamanan bagi masyarakat Filipina. Peneliti berasumsi bahwa Filipina telah berhasil memberikan keamanan tersebut kepada masyarakat Filipina. Asumsi ini didukung oleh polling yang dilakukan oleh Pulse Asia. Berdasarkan polling yang dilakukan oleh Pulse Asia pada tahun 2016, terdapat 81% masyarakat Filipina menyetujui pernyataan yang mengatakan bahwa mereka merasa lebih aman jika dibandingkan tahun lalu (Rappler,

06/04/2017). Pernyataan yang diambil oleh lembaga Pulse Asia Research Inc. merupakan cerita dari seorang wanita yang berasal dari Payatas, Quezon City. Hal tersebut dikatakan oleh wanita tersebut karena merasa para pecandu narkoba sudah disingkirkan dari jalanan Filipina sehingga ia merasa lebih aman (Rappler, 06/04/2017).

Dengan hasil survei yang dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan *War on Drugs* memberikan rasa aman pada masyarakatnya, yang mana merupakan salah satu tujuan utama dari kepentingan nasional Filipina. Masyarakat Filipina merasa lebih aman sekarang, dan hal tersebut dikarenakan oleh kekerasan yang dilakukan oleh negara, dan kekerasan negara menjadi legitimasi begitu masyarakat Filipina merasa bahwa mereka terlindungi oleh kebijakan tersebut (Kattouw, 2018, v). Tulisan milik Kattouw (2018) memberikan informasi mengenai kasil wawancara terhadap beberapa responden yang dapat dijadikan justifikasi dari asumsi bahwa kebijakan *War on Drugs* di Filipina dapat memberikan keamanan bagi masyarakat Filipina. Mayoritas responden dalam tulisan Kattouw (2018) mengatakan bahwa mereka merasa lebih aman setelah adanya kebijakan *War on Drugs*, karena sekarang kriminalitas berkurang (Kattouw, 2018: 55).

Kekerasan yang dilakukan oleh negara mereka merasa permasalahan dengan kejahatan berkurang, sehingga mereka merasa lebih aman dari sebelumnya (Kattouw, 2018:56). Dengan rasa aman yang diterima oleh masyarakat Filipina, dapat dikatakan bahwa Filipina berhasil memberikan keamanan bagi warganya yang mana merupakan tugas dari sebuah negara. Kebijakan publik *War on Drugs* yang berfokus pada keamanan nasional Filipina dapat memberikan efek terhadap tingkat kriminalitas sehingga rasa aman mulai tercipta di tengah masyarakat yang memiliki pengalaman rasa kurang aman akibat dari

maraknya kriminalitas sebelum diberlakukannya kebijakan *War on Drugs*.

PENUTUP

Filipina tetap memberlakukan kebijakan *War on Drugs* meskipun mendapati tekanan, dikarenakan Filipina ingin melindungi kepentingan nasionalnya, yaitu keamanan nasional yang terdapat di dalam kebijakan tersebut. Realisme percaya bahwa setiap negara yang merupakan aktor terpenting, memiliki tujuan untuk mengejar kepentingan nasional, dan kepentingan tersebut terkandung dalam kebijakan *War on Drugs*. Negara lain tidak memiliki hal untuk menilai kebijakan negara lain ataupun melakukan intervensi, karena hanya Filipina yang mengetahui apa yang diperlukan oleh negaranya sendiri, dan hal tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai baik ataupun buruk. Keluarnya Filipina dari ICC juga merupakan sikap yang diambil oleh Filipina karena ia merasa bahwa institusi internasional hanya dipercayai oleh realisme klasik, jika institusi tersebut mengizinkan negara anggotanya mengejar kepentingan nasional. Namun, ICC malah ingin menginvestasi kebijakan *War on Drugs* Filipina dan ikut mengancam kebijakan tersebut.

Dari semua respon tersebut, dapat disimpulkan bahwa Filipina ingin melindungi kebijakan domestiknya yang mana merupakan kepentingan keamanan nasional Filipina. Banyaknya kasus kejahatan yang berkorelasi dengan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba di Filipina tentunya mengancam keamanan masyarakatnya. Dengan adanya kebijakan *War on Drugs*, jumlah kasus kejahatan index di Filipina menurun dan masyarakat Filipina merasa jauh lebih aman daripada sebelum diberlakukan kebijakan *War on Drugs*. Hal tersebut tentunya selaras dengan tujuan utama dari Filipina, yang mana merupakan tugas negara untuk menjaga keamanan dan keselamatan warganya. Kebijakan nasional yang merupakan tujuan keamanan nasional

Filipina tersebut, dibuat oleh negara untuk memastikan kelangsungan hidupnya sebagai komunitas yang terpisah dan berdaulat, serta menjaga keselamatan dan kemakmuran warganya.

Dari penelitian di atas, peneliti bermaksud ingin memberikan saran bagi para pembaca ataupun peneliti yang akan membahas isu yang serupa. Terkait kebijakan *War on Drugs* yang dilakukan Filipina, peneliti membahas melalui sudut pandang negara yang mana penelitian ini berfokus pada ranah domestik Filipina, dengan analisa skema hubungan internasional. Peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian dengan sudut pandang yang berbeda, baik dari individu Presiden Filipina itu sendiri, ataupun dari sistem internasional sehingga mempengaruhi sikap Filipina dalam merespon tekanan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Jackson-Preece, J. (2011). *Security in international relations*. University of PLondon, 8.Human rights: Politics and practice, 44-59;
- Jill Steans, Lloyd Pettiford, Thomas Diez and Imad El-Anis. (2010). *An Introduction to International Relations Theory Perspectives and Themes Third edition*. Pearson Education Limited;
- Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (1999). *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism and Beyond*, 3e édition, Boston: Allwyn and Bacon Grunberg, Isabelle;

Tesis

- Kattouw, I. (2018). *Philippines' War on Drugs; the impact of Duterte's War on Drugs on the perceived safety of Filipino inhabitants and the impact on the regime's legitimacy*. Diakses melalui https://theses.uibn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/6988/Kattouw,_Iris_1.pdf?sequence=1

Media Massa

- The Guardian. (08/07/2019). Rodrigo Duterte's drug war is 'large-scale murdering enterprise' says Amnesty. [diakses pada 03 Maret 2020]. Diakses melalui

- <https://www.theguardian.com/world/2019/jul/08/rodrigo-dutertes-drug-war-is-large-scale-murdering-enterprise-says-amnesty>;
- Philstar Global. (31/01/2017). Duterte extends drug war until 2022. [diakses pada 7 Maret 2022]. Diakses melalui <https://www.philstar.com/headlines/2017/01/31/1667131/duterte-extends-drug-war-until-2022>;
- The ASEAN Post. (20/09/2020). The War Against Illegal Drugs Amid A Pandemic. [diakses pada 30 September 2020]. Diakses melalui <https://theaseanpost.com/article/war-against-illegal-drugs-amid-pandemic>;
- The Atlantic. (19/08/2019). The Uncounted Dead of Duterte's Drug War. [diakses pada 24 Desember 2021]. Diakses melalui <https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/08/philippines-dead-rodrigo-duterte-drug-war/595978/>;
- Philippine Drug Enforcement Agency. (2021). #REALNUMBERSPH. [diakses pada 1 Januari 2022]. Diakses melalui <https://pdea.gov.ph/pdea-map/2-uncategorised/279-realnumbersph>;
- CNN Philippines. (14/10/2016). Int'l Criminal Court chief prosecutor warns PH over drug killings. [diakses pada 6 Februari 2022]. Diakses melalui <https://www.cnnphilippines.com/news/2016/10/14/Intl-Criminal-Court-chief-prosecutor-warns-PH-over-drug-killings.html>;
- Reuters. (05/07/2019). Philippines faces call for U.N investigation into War on Drugs killings. [diakses pada 15 Maret 2020]. Diakses melalui <https://www.reuters.com/article/us-philippines-rights-un-idUSKCN1TZ22M>;
- Rappler. (26/07/2016). Duterte's marching orders for War on Drugs, crime, corruption. [diakses pada 10 Maret 2022]. Diakses melalui <https://www.rappler.com/nation/141011-sona-2016-duterte-marching-orders-police-drugs-crime-corruption/>;
- Philippine News Agency. (08/01/2020). PNP official says crime dip proves gains of war on drugs. [diakses 10 Maret 2022]. Diakses melalui <https://www.pna.gov.ph/articles/1090308>
- Inquirer.net. (26/07/2021). In bid to make PH safe, killings become norm. [diakses 10 Maret 2022]. Diakses melalui <https://newsinfo.inquirer.net/1464494/in-bid-to-make-ph-safe-killings-become-norm#ixzz76iX4csJf>

Rappler. (06/04/2017). Understanding public support for Duterte's drugs war. [diakses pada 7 Maret 2022]. Diakses melalui <https://www.rappler.com/voices/thought-leaders/166092-philippines-drugs-war-pulse-sws-public-perception/>;

Dokumen Resmi

Philippine Drugs Enforcement Agency. Annual Report 2012: The Philippine Drug Situation. (2012). [diakses pada 21 Desember 2021]. Diakses melalui <https://pdea.gov.ph/2-uncategorised/1633-2012-annual-report>;

Philippine National Police. PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan – Project: “Double Barrel”. [diakses pada 7 Juni 2022]. Diakses melalui <https://www.didm.pnp.gov.ph/images/Command%20Memorandum%20Circulars/CMC%202016-16%20PNP%20ANTI-ILLEGAL%20DRUGS%20CAMPAIGN%20PLAN%20%20PROJECT%20DOUBLE%20BARREL.pdf>

Asia-Pacific Center for Security Studies. National Security Strategy Philippines 2018. [diakses pada 12 Maret 2022]. Diakses melalui https://apcss.org/wp-content/uploads/2020/02/Philippines-National_Security_Strategy_2018.pdf;

Situs Resmi

Republic of The Philippines Office of The President Dangerous Drugs Board. (19/11/2018). History. [diakses pada 15 Agustus 2020]. Diakses melalui <https://www.ddb.gov.ph/about-ddb/history>;

Republic of the Philippines Philippine News Agency. (08/01/2020). PNP official says crime dip proves gains of War on Drugs. [diakses pada 10 Maret 2022]. Diakses melalui <https://www.pna.gov.ph/articles/1090308>;

Philippine Drug Enforcement Agency. (2021). #REALNUMBERSPH. [diakses pada 1 Januari 2022]. Diakses melalui <https://pdea.gov.ph/pdea-map/2-uncategorised/279-realnumbersph>;

Ministry for Foreign Affairs Government of Iceland. (12/07/2019). Iceland's resolution on the situation in the Philippines approved in the UN Human Rights Council. [diakses pada 4 Maret 2022]. Diakses melalui <https://www.government.is/diplomatic-missions/embassy-article/2019/07/11/Iceland-resolution-on-the-situation-in-the-Philippines-approved-in-the-UN-Human-Rights-Council/>